

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno., Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum (teori dan praktik)*, Kencana, Jakarta.
- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI , Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Burhan Bungin , H. M., 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ewin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, CV. Budi Utama Group, Yogyakarta
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2016, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Ed.2, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- M.S., Amir., 2003. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 1998, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.

Kumar, Ranjit, 1999, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Addison Wesley Longman Australia Pty. Ltd., Melbourne.

Pusat Mediasi Nasional., 2019, *Pelatihan Sertifikasi Mediator 40 Jam*, PMN, Jakarta.

Radbruch, Gustav, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, :Koehler Verlag, Stuutgart.

Surbakti, Natangsa, 2014, *Peradilan Restoratif; dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan*, Genta Publishing, Jogjakarta.

Subekti, R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-21, Intermasa, Jakarta.

Soesilo, R, 2018, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, cet. Ke 15, Politeia, Bogor.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pegantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichthiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Laporan Hasil Penelitian

Nurhikmah, 2016, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Tesis*, Program Magister Hukum Universitas Medan Area, Sumatra Utara.

Abdillah, Maulana, 2016, “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Universitas Tanjung pura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat UUD N RI Tahun 1945 LN Tahun 2006 Nomor 14

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Bulgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) Staatsblad 1847-52, Staatsblad
1849-63.

Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Berita Negara (Staatsblad) Tahun 1848
16 jo 57 dan Staatsblad. 1941-31,32, 44. Lembaran Negara No. 16
jo 57/1848.

Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en
Madura (RBg) Staatsblad. 1927-227.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng.

Wawancara

Shahab, Fahmi, 2022, Peran Mediator dan Hakim, Peran Mediator dan Hakim
Pemeriksa Perkara Dalam Penerapan Mediasi, *Wawancara*, Jakarta, 2
Februari

Hadrian, Endang, 2022, Kedudukan Hukum Dan Akibat Hukum Akta Perdamaian,
Wawancara, Jakarta, 10 Februari

Dewi, Diah Sulastri, 2022, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
2022, Syarat Formil dan Kedudukan Hukum Akta Perdamaian serts Peran
Mediator dan Hakim Dalam Pengukuhan Putusan Perdamaian, *Wawancara*
, Jakarta, 2 Maret.

Internet

Wijayanta, Tata, Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam
Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika
Hukum*, Mei 2014, hlm. 219, diakses 15 April 2022.

Wijayanta, Tata, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supartinah, Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal, *Jurnal Mimbar Hukum*, Oktober 2010, hlm.573, diakses 15 April 2022.

Prakoso, Aji, M., Jerry Indrawan, “Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Desember 2019, [http://C:/Users/user/Downloads/637-3904-1-PB%20\(1\).pdf](http://C:/Users/user/Downloads/637-3904-1-PB%20(1).pdf), diakses tanggal 26 Oktober 2021.

Anak Agung Istri Mas Rahardianti, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum AcaraPerdata, *Jurnal Kertha Wicara*, 14 Oktober 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/65859>, diakses 7 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) (<http://kbbi.web.id/damai>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Laporan Tahunan 2018: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Laporan Tahunan (Annual), Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 122, diakses pada tanggal 26 April 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan. Laporan Tahunan (Annual), Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 125, diakses pada tanggal 26 April 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. Laporan Tahunan 2020: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan. Laporan Tahunan (Annual), Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 152, diakses pada tanggal 26 April 2022`

Lampiran

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng.

Shahab, Fahmi, 2022, Peran Mediator dan Hakim, Peran Mediator dan Hakim Pemeriksa Perkara Dalam Penerapan Mediasi, *Wawancara*, Jakarta, 2 Februari

Hadrian, Endang, 2022, Kedudukan Hukum Dan Akibat Hukum Akta Perdamaian,

Wawancara, Jakarta, 10 Februari

Dewi, Diah Sulastri, 2022, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2022, Syarat Formil dan Kedudukan Hukum Akta Perdamaian serts Peran Mediator dan Hakim Dalam Pengukuhan Putusan Perdamaian, *Wawancara*, Jakarta, 2 Maret.